

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan adanya kasus century yang terjadi pada tahun 2008, mengakibatkan terjadinya krisis keuangan di Indonesia. Mengingat krisis yang terjadi mengancam perekonomian Nasional, Pemerintah Indonesia akhirnya membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam rangka menghadapi ancaman krisis keuangan global yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian Nasional¹.

Dikeluarkannya Perpu oleh Presiden harus memuat unsur hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 :

“ Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.”

Penetapan Perpu oleh Presiden ini juga tertulis dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan². Presiden sebagai penguasa ranah eksekutif dalam ketatanegaraan Indonesia, diberikan hak prerogatif subjektif untuk membuat Perpu. Presidenlah yang menafsirkan keadaan

¹ Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *DPR RI Setujui Pencabutan Perpu JPSK*, <http://www.kemenkeu.go.id/SP/dpr-ri-setujui-pencabutan-perpu-jpsk>, diakses 1 Agustus 2016.

² Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

kegentingan memaksa terkait kondisi pemerintahan yang sedang dihadapinya³.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perpu digolongkan dalam bentuk peraturan Perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari segi muatan yang terdapat dalam Perpu sama dengan materi muatan Undang-Undang, format dan bentuk dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sepenuhnya mengikuti format Undang-Undang⁴.

Hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 merupakan penilaian subjektif Presiden, Sedangkan Objektivitasnya dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan, untuk dapat menerima atau menolak penetapan Perpu menjadi Undang-Undang⁵. Perihal hal ihwal kegentingan yang memaksa, yang menjadi dasar Presiden dalam menetapkan Perpu adalah untuk kemudian dijadikan payung hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan, karna kedudukan Perpu yang setara dengan Undang-Undang. Kriteria tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah hal ihwal kegentingan yang memaksa adalah suatu keadaan yang

³Retno Saraswati, "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif" dalam jurnal *Masalah-Masalah Hukum*, No. 41/1/2012, hlm.137-140.

⁴M. Armia, MH, PhD, "Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)", Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Volume 48, Nomor 1, Juni 2014, hlm.266.

⁵*Ibid*,

sukar, penting, dan terkadang krusial sifatnya, serta harus ditanggulangi segera dengan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang setingkat dengan Undang-Undang⁶.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, kondisi genting atau darurat itu bisa saja dihadapi Presiden sebagai Pemegang kekuasaan eksekutif, dimana alternatif lain tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perpu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut⁷. Ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yaitu⁸ :

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang.
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, diatur segala ketentuan yang berkaitan dengan Perpu. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 52 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

⁶ I Gede Pantja Astawa, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Versus Putusan Final Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013.

⁷ Anthon F.Santoso, “Problematika Nalar dan Kekuasaan Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 36P/Hum/2011” dalam Jurnal Yudisial, No.5/II/2012, hlm. 18.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perundang-Undangan, yaitu :

1. Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut (Persidangan pertama DPR setelah Perpu ditetapkan Presiden).
2. Pengajuan Perpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang.
3. DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu.
4. Dalam hal Perpu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perpu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.
5. Dalam hal Perpu tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perpu tersebut harus dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Dalam hal Perpu harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang pencabutan Perpu.
7. RUU tentang pencabutan Perpu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Perpu.
8. RUU tentang pencabutan Perpu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Perpu dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang sebelumnya dalam UU No.10 Tahun 2004. Ketentuan mengenai

Perpu diatur dalam Bab V tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

Bagian Kedua, Pasal 52 UU No.10 Tahun 2004, yaitu :

1. Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.
2. Pengajuan Perpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perpu menjadi Undang-Undang.
3. Dalam hal Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut tidak berlaku.
4. Dalam hal Perpu ditolak DPR, maka Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut.

Hubungan Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan

kekuasaan pembentukan Undang-Undang tertuang dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945⁹. Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan pertama¹⁰, hak Presiden untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepada DPR tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945¹¹. Presiden yang merupakan puncak kekuasaan eksekutif dalam menjalankan kekuasaannya bekerja sama dengan DPR sebagai lembaga legislatif. Langkah seperti ini merupakan bagian dari proses *check and balances* dari sistem ketatanegaraan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang dari lembaga lembaga negara¹².

Jika suatu Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, konsekuensinya ialah Perpu itu harus dicabut dan dinyatakan ketidakberlakuannya, serta memuat akibat hukum dari pencabutan Perpu tersebut¹³. Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang DPR yang terdapat dalam Pasal 71 huruf b Undang-Undang No.27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

⁹Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, ayat (2) : Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut, ayat (3) : Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

¹⁰ Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : Tiap-tiap Undang-Undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

¹¹ Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yaitu : Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

¹²M. Armia, MH, PhD, *Op.Cit.*, hlm. 275.

¹³Ni'matul Huda, *Problematika substantif Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konsitusi Volume 10, Desember 2013.

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

“DPR mempunyai tugas dan wewenang memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi Undang-Undang”

Tiga Perpu yang ditetapkan oleh Presiden sebagai bentuk upaya penanganan krisis pada tahun 2008 berdasarkan kewenangannya yang telah diatur oleh Undang-Undang, diantaranya Perpu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Presiden kemudian mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sebelumnya berbentuk Perpu dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 18 Desember 2008, dari ketiga Perpu yang diajukan kepada DPR, DPR hanya mengesahkan dua Perpu, yaitu Perpu No. 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia (BI), dan Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sedangkan untuk Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), tidak ada kata menyetujui atau menolak Perpu No. 4 Tahun 2008, Ketua DPR dalam suratnya hanya

menyatakan, antara lain “ Menyepakati untuk meminta kepada pemerintah agar segera mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebelum tanggal 19 Januari 2009¹⁴.

Terkait hasil rapat paripurna tersebut, terdapat perbedaan persepsi antara Pemerintah dengan DPR, yakni tentang pemberlakuan Perpu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK. Ketidakjelasan status Perpu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK ini mengakibatkan diragukannya legalitas dari Perpu itu sendiri. Jika memang Perpu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK tidak mendapat persetujuan, maka Perpu tersebut harus dicabut dan dinyatakan ketidakberlakuannya dengan mengajukan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Perpu dengan menyertakan segala akibat hukumnya. Rancangan Undang-Undang yang dimintakan DPR dalam suratnya kepada Presiden tentang JPSK belum bisa diajukan karna Perpu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK belum resmi di cabut.

Untuk memecahkan kebuntuan terkait status Perpu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK, Pemerintah melalui surat Presiden Nomor R-33/Pres/2015 tanggal 26 Mei 2015 mengajukan RUU tentang pencabutan Perpu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK yang kemudian di bahas dalam sidang paripurna DPR¹⁵. Pada tanggal 07 Juli 2015, Komisi XI DPR RI dan Pemerintah sepakat menyetujui RUU tentang

¹⁴Yuli Harsono, *Polemik Penolakan Perpu JPSK*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b557621e5e83/polemik-penolakan-perpu-jpsk-br-oleh-yuli-harsono>, diakses 25 Juni 2016.

¹⁵ CNN Indonesia, *Perpu JPSK Resmi Dicabut Melalui Rapat Paripurna DPR*, <http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20150707183251-78-65012/>, diakses 15 Juni 2016.

pencabutan Perpu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK untuk kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang. RUU pencabutan Perpu JPSK terdiri dari 3 (tiga) pasal, yaitu¹⁶:

1. Ketentuan mengenai pencabutan dan tidak berlakunya Perpu JPSK;
2. Ketentuan yang menyatakan bahwa keputusan yang ditetapkan berdasarkan Perpu JPSK tetap sah dan mengikat; dan
3. Ketentuan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tentang Pencabutan Perpu JPSK mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Rentang waktu yang sangat lama, yaitu mencapai 7 tahun (Periode 2004-2009 dan 2009-2014), sejak Perpu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK ditetapkan oleh Presiden pada bulan Oktober tahun 2008, yang kemudian dibahas dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 18 Desember 2008, yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan Perpu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK itu sendiri yang pada akhirnya ditetapkanlah RUU Pencabutan Perpu No.4 Tahun 2008 ini oleh DPR dalam Rapat Peripurna tahun 2015¹⁷.

Hal ini memperlihatkan bahwa tidak adanya kejelasan rentang waktu yang diatur secara pasti baik dalam UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maupun dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tidak ada batas waktu yang pasti antara penolakan atas penetapan Perpu menjadi Undang-Undang oleh DPR RI dengan penyerahan RUU

¹⁶Ministry of Finance Republic of Indonesia, *DPR RI Setujui Pencabutan Perpu JPSK*, <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/46387>, diakses 15 Juni 2016.

¹⁷ Liputan 6, *Era Jokowi, DPR Setuju Cabut Perpu JPSK*, <http://bbm.liputan6.com/read/2267668>, diakses 15 Juni 2016.

pencabutan Perpu, dan pengesahan RUU Pencabutan Perpu menjadi Undang-Undang Pencabutan Perpu tersebut. Tidak ada dasar yang pasti bagaimana pernyataan yang benar ketika DPR menyetujui ataupun menolak Perpu. Terjadinya ketidakpastian hukum terlihat dalam polemik kasus Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang JPSK ini, yaitu akibat hukum yang akan timbul jika status Perpu tidak jelas apakah masih berlaku atau tidak. Pernyataan yang disampaikan DPR RI dalam sidang Paripurna guna membahas RUU Perpu yang akan disahkan menjadi Undang-Undang juga merupakan hal utama yang memungkinkan terjadinya multitafsir atas status sebuah Perpu. Karna tidak ada pernyataan secara tegas oleh DPR yang menyatakan menolak Perpu, yang membuat Pemerintah beranggapan bahwa DPR belum menolak Perpu. Mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang menyatakan bahwa ketika Perpu ditolak maka wewenang untuk mengajukan RUU Pencabutan Perpu tersebut ada ditangan Presiden¹⁸. Namun setelah berlakunya Undang-Undang yang baru mengenai mekanisme Penetapan dan Pencabutan Perpu yang diatur dalam Pasal 52 UU No.12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kewenangan untuk mengajukan RUU Pencabutan Perpu untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang, ada di tangan DPR atau

¹⁸ Pasal 25 ayat (4) UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi : Dalam hal Perpu ditolak oleh DPR, maka Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut.

Presiden¹⁹.

Ketentuan bahwa hanya Presiden yang berhak mengajukan RUU Pencabutan Perpu yang diatur dalam Pasal 52 ayat (4) UU No.10 Tahun 2004 hanya bisa dijadikan landasan hukum sampai saat diberlakukannya Undang-Undang yang baru yaitu UU No.12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan wewenang untuk mengajukan RUU Pencabutan Perpu yang kemudian akan disahkan menjadi UU Pencabutan Perpu kepada DPR atau Presiden. Bukan seperti hal yang terjadi pada Perpu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK, yang ketika DPR menolak Perpu, kemudian meminta Pemerintah segera mengajukan RUU JPSK. Dimana seharusnya DPR meminta Pemerintah untuk mengajukan RUU Pencabutan terlebih dahulu, setelah Resmi dicabut melalui UU Pencabutan Perpu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK, barulah bisa kemudian dibahas RUU JPSK. Pun jika Presiden tidak mengajukan RUU Pencabutan Perpu, DPR memiliki wewenang untuk mengajukan RUU Pencabutan Perpu dan mensahkan UU Pencabutan Perpu tersebut.

¹⁹Pasal 52 ayat (6) UU No.12 Tahun 2011 berbunyi : Dalam hal Perpu harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ?
2. Bagaimana implikasi hukum dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ditolak terhadap pemberlakuan ketentuan tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, dapat dikemukakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan membahas mekanisme pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ditolak terhadap pemberlakuan ketentuan tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diwujudkan agar memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat itu diuraikan dalam bentuk manfaat teoritis dan praktis. Berikut pemaparannya:

1. Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat dalam bentuk kepustakaan yang akan memperkaya studi keilmuan Hukum Tata Negara terutama mengenai implikasi hukum terhadap pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

2. Praktis

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pemecahan suatu permasalahan bagi pembaca khususnya bagi praktisi dan akademisi hukum.

E. Metode Penelitian

Agar dapat memenuhi tujuan dan mewujudkan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Yaitu metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif . Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang

dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka²⁰.

Adapun macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu²¹ :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan yaitu UUD 1945, Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR, TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, UU No.10 Tahun 2004 tentang PPP, UU No.6 Tahun 2009 tentang BI, UU No.7 Tahun 2009 tentang LPS, UU no.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU No.12 Tahun 2011 tentang PPP, UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, Perpu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK,

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan yang dijadikan acuan oleh penulis yaitu dari salah seorang Dosen

²⁰Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal.13-14.

²¹ Surya Walfajri, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, diakses 29 Agustus 2016, jam 13:00 WIB.

Fakultas Hukum Unand, yaitu Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., dalam hal mekanisme Pencabutan Perpu yang belum sesuai dengan apa yang diatur oleh UU, mantan ketua MK yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., seorang politisi bernama Ahmad Yani, S.H., M.H., kemudian dengan adanya Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Perpu No.4 Tahun 2009 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Metode perbandingan adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan antara dua objek penelitian atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang obyek-obyek yang diselidiki. Dalam Skripsi ini Penulis membandingkan jangka waktu saat suatu Perpu ditetapkan oleh Presiden hingga Perpu ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan jangka waktu saat suatu Perpu ditetapkan oleh Presiden hingga Perpu dicabut melalui UU Pencabutan Perpu.

2. Bahan Hukum

Sebagai penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, maka penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti dokumen-dokumen resmi, literature-literatur, dan hasil penelitian dalam bentuk lainnya. Memperoleh data

sekunderyaitumelalui bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer,

adalah bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, sesuai dengan isi yang

diangkat bahwa peraturan perundang-undangan yang

dimaksud adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
3. TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
10. Perpu Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)
11. Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penafsiran tentang hukum melalui literatur-literatur, hasil penelitian, dan jurnal.

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang membantudalam penjelasan istilah-istilah yang akan timbul dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus-kamus, surat kabar, dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan pengetahuan tentang isu yang

diangkat melalui analisis dari doktrin-doktrin teoritis dan mengkaitkannya dengan objek penelitian, sehingga permasalahan yang diangkat menjadi terang.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*

yaitu pengolahan dengan menyusun data-data yang didapatkan menjadi data yang sistematis, terstruktur, berurutan dan saling berkaitan satu sama lain.

b. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni bahan hukum yang terkumpul disusun, digambarkan, dikembangkan dan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat, frase dan diksi.



